



## PTSL YOGYA JADI TARGET PERCONTOHAN 4.916 Bidang Tanah Belum Terdaftar

**YOGYA (KR)** - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun ini bakal dimaksimalkan. Hal ini seiring rencana pemerintah untuk menjadikan Yogya sebagai percontohan nasional dalam mewujudkan peta tunggal bidang tanah.

"Program ini sudah dimulai sejak tahun 2017. Hingga tahun lalu, sebanyak 99 persen bidang tanah di DIY sudah terdaftar. Program pendaftaran akan kami lanjutkan tahun ini dengan target 240.000 bidang tanah di DIY," kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Tri Wibisono, saat memberikan sosialisasi di Balaikota Yogya, Rabu (14/3).

Sasaran PTSL tidak hanya tanah yang digunakan oleh masyarakat, tetapi seluruh tanah yang juga digunakan untuk kepentingan sosial misalnya embung dan tanah kas desa. Begitu pula seluruh tanah di DIY yang berstatus Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

Salah satu hasil dari pelaksanaan PTSL adalah diter-

bitkannya Peta Tunggal Bidang Tanah berskala besar. Peta tunggal tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebijakan pembangunan di daerah mulai pajak bumi dan bangunan (PBB), pengendalian pemanfaatan lahan baik yang berstatus milik pemerintah maupun SG dan PAG. "Secara nasional PTSL ditargetkan selesai pada 2023, namun di DIY diharapkan sudah dapat diselesaikan pada 2020," imbuhnya.

Kepala BPN Kota Yogya, Sumardiyono, menambahkan masih terdapat 4.916 bidang tanah di Kota Yogya yang belum terdaftar. Akan tetapi, jika dilakukan pendataan melalui PTSL besar kemungkinan akan bertambah. Hal ini lantaran banyak bidang tanah yang sudah dipecah-pecah menjadi beberapa bagian aki-

bat aktivitas jual beli. "Target PTSL tahun ini di Kota Yogya ialah 4.500 bidang. Tapi bisa bertambah karena ada penambahan anggaran," tandasnya.

Pola pendataan akan dilakukan per kelurahan hingga benar-benar tuntas, baru pindah ke kelurahan lain. Percontohan PTSL diawali dari Kelurahan Bumijo Jetis.

Sementara Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Yogya, KGPH Hadiwinoto, menilai pola pendataan tanah di Yogya sudah jauh lebih dulu dibanding Pemerintah RI. Oleh karena itu target menjadikan Yogya sebagai percontohan seharusnya dapat dicapai dengan mudah.

Sedangkan Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi, mengatakan pendaftaran tanah sangat dibutuhkan agar masyarakat pun memperoleh kepastian hukum alas hak atas tanah yang mereka gunakan. Bagi pemerintah, juga bisa diperoleh kepastian saat akan memberikan bantuan. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005